BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia termasuk ke dalam negara yang menganut sistem otonomi daerah. Otonomi daerah memberi kedaulatan dan tanggung jawab pada tiap daerah dalam upaya memenuhi keperluan daerahnya. Akan tetapi, pada kenyataannya ada beberapa daerah tidak sanggup seutuhnya dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga kebutuhan daerahnya tidak sepenuhnya terpenuhi. Sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal pada daerah. Maka dari itu dalam melaksanakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat mengalokasikan dana APBD berupa dana perimbangan untuk daerah dalam membantu membiayai keperluan daerah (Elisabeth,2018).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) merupakan institusi pemerintah untuk bertugas menangani penyelenggaraan penerimaan dan pengeluaran daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan pihak pertama yang melaksanakan otonomi daerah dalam mengelola dana APBD untuk mendanai kebutuhan daerah. Penatausahaan keuangan daerah termasuk dalam rangkaian dari pengelolaan Keuangan Daerah. Penerimaan dan pengeluaran daerah sumber pendanaannya dari APBD. Dalam APBD terdapat Dana Perimbangan, salah satunya yang dimaksud yaitu Dana Alokasi Khusus.

Menurut Pratama (2019), dana alokasi khusus yakni tanggung jawab pemerintah pusat untuk daerah dalam mewujudkan desentraliisasi fiskal yang mempunyai karakter yang spesifik artinya dana alokasi khusus memiliki tujuan khusus yang menjadi urusan daerah dalam rangka membantu membiayai kegiatan yang menjadi prioritas nasional. Penelitian ini akan lebih difokuskan pada DAK Non Fisik BOK atau bantuan operasional kesehatan. Dana BOK dipusatkan untuk akselerasi perolehan SPM bidang kesehatan dan untuk menyelenggarakan program *Sustainable Development Goals* (SDG's) bidang

kesehatan yang berbasis nasional. Dana bantuan operasional kesehatan mulai di alokasikan sebesar Rp.9.708,6 miliar, termasuk untuk dukungan penanganan stunting yang dialokasikan bagi 260 daerah.

Di dalam melakukan segala sesuatu tentunya pasti ada mekanisme atau prosedurnya. Berpijak dari hal tersebut di dalam pencairan DAK khususnya DAK Non fisik BOK juga harus ada mekanisme atau prosedurnya guna mempercepat dan mempermudah dalam proses pengalokasian serta menjamin penindakan secara serupa terhadap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Permasalahan yang muncul adalah beberapa masyarakat mengeluhkan waktu yang lama dalam upaya penyediaan sejumlah dana untuk masyarakat. Oleh sebab itu perlu dipertanyakan apakah Pejabat Pengelola Keuangan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai prosedur. Agar dapat mengetahui hal tersebut perlu diadakannya sebuah penelitian guna mendapatkan informasi yang sesuai terkait dengan mekanisme atau prosedur pencairan tersebut apakah telah diterapkan secara benar.

Berdasarkan pemaparan diatas maka judul yang akan diambil penulis dalam penelitian ini yaitu **"Analisis Mekanisme Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOK Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kabupaten Buleleng".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang sudah dijabarkan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan sebuah inti masalah yaitu : Bagaimana mekanisme pencairan dana alokasi khusus (DAK) non fisik BOK pada kantor BPKPD Kabupaten Buleleng ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berkenaan dengan inti masalah yakni untuk dapat memberikan informasi terkait mekanisme pencairan dana alokasi khusus (DAK) non fisik BOK pada Kantor BPKPD di Kabupaten Buleleng.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis setelah penyusunan tugas akhir ini yaitu:

1) Bagi Mahasiswa

   Melalui penelitian ini agar mampu memberikan informasi mengenai mekanisme pencairan dana alokasi khusus (DAK) non fisik BOK di Kantor BPKPD Kabupaten Buleleng dan juga penulis mampu menerapkan ilmu yang didapat sewaktu perkuliahan.

2) Bagii Universitas Pendidikan Ganesha

   Diharapkan agar bisa bermanfaat serta dapat dipakai sebagai acuan bagi Lembaga UNDIKSHA khususnya Fakultas Ekonomi untuk dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian terhadap mahasiswa mengenai perkembangan bidang ilmu yang sudah ditekuni dibangku perkuliahan serta mampu memberikan tambahan literatur atau rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan mekanisme pencairan dana alokasi khusus non fisik BOK pada Kantor BPKPD Kabupaten Buleleng.

3) Bagi Kantor BPKPD di Kabupaten Buleleng

   Bisa dimanfaatkan sebagai landasan evaluasi serta informasi oleh Kantor BPKPD Kabupaten Buleleng agar lebih mengoptimalkan mekanisme dalam melakukan proses pencairan dana alokasi khusus (DAK) non fisik BOK pada instansi.